

Pengaruh Pajak PBB-P2 dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Diyah Ayu Rahmadani¹, Eulin Karlina²

^{1,2}Universitas Bina Sarana Informatika
Jalan Kramat Jaya No.98 Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail korespondensi: ayudiyah722@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing. Dengan fenomena yang terjadi dimana dari 8 sektor pajak di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak daerah jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah kecamatan Cilincing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder yaitu jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan periode 2018-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dianalisis secara terpisah PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00 (PBB-P2) dan 0,00 (BPHTB). Jika dianalisis secara simultan keduanya memiliki signifikansi $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah.

Kata Kunci : PBB-P2,BPHTB,Penerimaan Pajak Daerah

Abstracts - This research was conducted at the Cilincing District Regional Tax Collection Service Unit. With the phenomenon that occurs where from 8 tax sectors in the Cilincing District Regional Tax Collection Service Unit, rural and urban land and building tax, and land and building acquisition duties tax, are the taxes that contribute the most to local tax revenue when compared to other tax sectors. The purpose of this study is to determine the effect of rural and urban land and building tax and land and building acquisition duty tax on local tax revenue in Cilincing sub-district. The method used in this research is quantitative descriptive method and uses secondary data, which is the total of revenue from rural and urban land and building tax and tax on acquisition of land and building rights for the period 2018-2022. The results of this study indicate that if analyzed, separately PBB-P2 and BPHTB have a significant effect on local tax revenue with a significance value of less than 0.05, that is, 0.00 (PBB-P2) and 0.00 (BPHTB). If analyzed simultaneously both have a significance of $0.00 < 0.05$ which means that both have a significant effect on local taxes.

Keywords : PBB-P2,BPHTB,Local Tax Revenue

1. Pendahuluan

Sistem kekuasaan pemerintah Indonesia mengalami perubahan dari yang sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi, serta penerapan otomatis daerah yang diisyaratkan melalui pembukaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sudah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir berubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pada era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri. Dengan begitu Otonomi Daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pendapatan paling banyak diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, BPHTB dan PBB-P2. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan (Yani et al., 2019) yaitu tentang Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa, yang menyatakan bahwa PBB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Langsa, sedangkan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Kota Langsa. Penelitian yang dilakukan (Yanuar, 2019) menyatakan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.



Berikut terlampir data Penerimaan Pajak Daerah di Kecamatan Cilincing selama kurun waktu 5 tahun, sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022

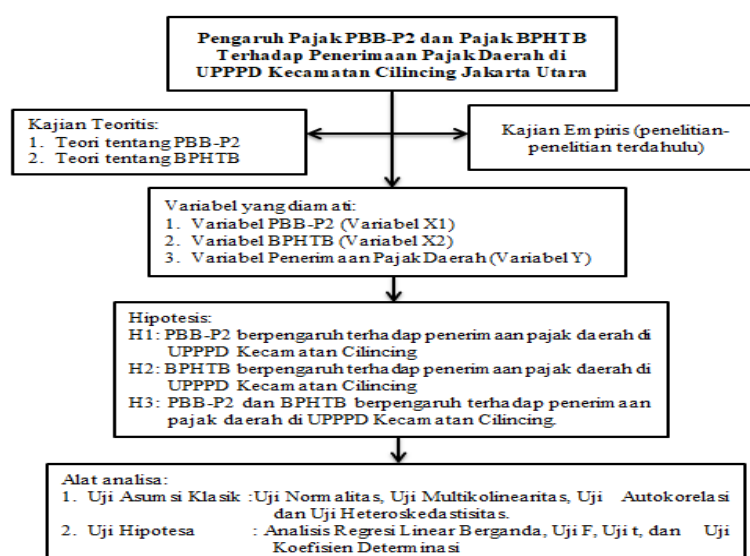
No.	Jenis Pajak	2018	2019	Tahun 2020	2021	2022
1	Hotel	520.419.490	589.520.700	556.829.092	564.359.200	556.872.011
2	Restoran	552.172.172	676.483.439	545.952.336	586.903.244	800.610.958
3	Hiburan	-	-	-	-	-
4	Parkir	422.548.132	491.136.667	324.920.834	428.579.768	503.055.869
5	Reklame	4.636.523.641	5.508.661.482	3.415.296.533	3.181.358.043	4.837.519.654
6	Air					
7	Tanah	239.357.715	41.719.120	-	-	-
8	BPHTB	65.723.027.411	130.589.042.401	106.374.164.935	91.633.192.719	84.185.033.021
8	PBB-P2	236.530.501.935	263.566.151.299	254.183.977.708	265.006.690.535	275.586.068.706
	Total	308.624.550.496	401.462.715.108	365.401.141.438	361.401.083.509	366.477.047.525

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak daerah di Kecamatan Cilincing dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian dari delapan sektor pajak pada tabel di atas pajak BPHTB dan PBB-P2 merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran”(Basri, 2022). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pratiwi, 2019).

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Kristina, 2019). Menurut Setiawan “Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan” (Tetti, 2019). “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang terutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang” (Marihot, 2016).

Kerangka berpikir adalah narasi dari peleh sebagai bahan untuk membuat rumusan hipotesis (Syahputri et al., 2023). Model kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis dari kerangka pikir di atas sebagai berikut:

H₀₁ : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing.

H₀₂ : Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing.

H₀₃ : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa data *time series* periode tahun 2018-2022. Data yang dipergunakan meliputi jumlah penerimaan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Prosedur penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Pajak Daerah dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di Kecamatan Cilincing. Sampel yang diambil data bulanan selama 5 tahun periode 2018-2022 yang berjumlah 60 sampel dari 3 variabel penelitian.

Namun hasil *screening* data menghasilkan 19 data yang harus dieliminasi dalam penelitian. Data tersebut merupakan data *outlier*, yaitu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.

Tabel 2. Keterangan Jumlah Tabel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah sampel penelitian sebelum di outlier	60
2	Data outlier	(19)
3	Jumlah Sampel Setelah di Outlier	41

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik manual dengan cara memperoleh data langsung dari UPPPD Kecamatan Cilincing yaitu berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah periode 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, analisis asumsi klasik: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis: uji F(uji secara simultan) dan uji T(uji secara parsial), serta uji koefisien determinasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata(mean) standar deviasi, varian maksimum,minimum,sum range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi (Tapokabkab & Rosyati, 2023).

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB-P2	41	252973395	43690208920	10822587102,17	11763761947,352
BPHTB	41	866475300	8003620945	3335625385,20	1878693853,473
Penerimaan Pajak Daerah	41	44088	223257	110351,00	50269,631
Valid N (listwise)	41				

Dari hasil perhitungan pada tabel 3 dapat diketahui nilai rata-rata(mean) dan standar deviasi pada tiap variabel. Nilai Minimum variabel bebas, yaitu PBB-P2 adalah Rp 252.973.395. Besarnya nilai maximum Rp 43.690.208.920. Nilai rata-rata (Mean) Rp.10.822.587.102 Nilai standar deviasi Rp. 11.763.761.947. Sedangkan nilai minimum dari BPHTB yaitu Rp 866.475.300. Besarnya nilai maximum Rp 8.003.620.945. Nilai rata-rata (mean) Rp. 3.335.625.385 dan besarnya standar deviasinya Rp 1.878.693.853. Untuk nilai minimum variabel terikat yaitu penerimaan pajak daerah adalah Rp 44.088. Besarnya nilai maximum Rp 223.257. Nilai rata-rata(mean) Rp. 110.351. Nilai standar deviasinya adalah Rp 50.270.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			41
Normal	Mean		,0000000
Parameters ^{a,b}	Std.		8740,81632767
	Deviation		
Most	Absolute		,129
Extreme	Positive		,074
Differences	Negative		-,129
Test Statistic			,129
Asymp. Sig. (2-tailed)			,086 ^c

Uji normalitas termasuk dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat diketahui dengan melihat tabel *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Kriteria sebuah data residual terdistribusi normal yang pertama jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka penelitian berdistribusi normal, namun jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2019). Nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Standardize		d			
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.	VIF
1	(Constant)	54169,537	2882,830		18,790	,000	
	PBB-P2	3,749E-6	,000	,877	25,913	,000	,694
	BPHTB	4,681E-6	,000	,175	5,167	,000	,694

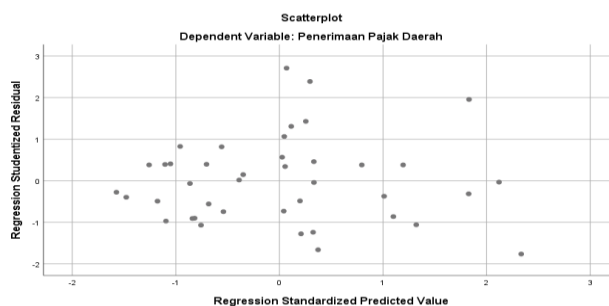
Uji Multikolinearitas termasuk dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas didalam regresi yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Sedangkan jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2019). Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat diketahui nilai tolerance untuk variabel PBB-P2 dan BPHTB sama-sama 0,694, karena nilai tolerance dari kedua variabel lebih besar dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan nilai VIF untuk kedua variabel sama-sama 1,440 menunjukkan bahwa nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,985 ^a	,970	,968	8967,889	1,835	

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB-P2
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Uji autokorelasi termasuk dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat diketahui dengan metode *Durbin-Waston (DW)* dengan menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai DW < -2 artinya terdapat autokorelasi positif, apabila nilai DW diantara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi, dan apabila nilai DW diatas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2019). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai DW sebesar 1,835 yang artinya -2 lebih kecil dari nilai DW dan atau lebih kecil dari +2 ($-2 < 1,835 < +2$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.



Gambar 2. Scatterplot

Uji heteroskedastisitas termasuk dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2019). Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Yang dapat dilihat pada gambar di atas bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	54169,537	2882,830		18,790	,000		
PBB-P2	3,749E-6	,000	,877	25,913	,000	,694	1,440
BPHTB	4,681E-6	,000	,175	5,167	,000	,694	1,440

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas(PBB-P2 dan BPHTB) terhadap variabel terikatnya yaitu penerimaan pajak daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing (Ghozali, 2019). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 54169,537. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi PBB-P2 (X1) dan pajak BPHTB (X2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penerimaan pajak daerah adalah 54169,537.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel PBB-P2 (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,877. Hal ini menunjukkan jika PBB-P2 mengalami kenaikan 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0,877 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel BPHTB (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,175. Hal ini menunjukkan jika BPHTB mengalami kenaikan 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0,175 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	98025358860,215	2	49012679430,108	609,436	,000 ^b
	Residual	3056074938,516	38	80423024,698		
	Total	101081433798,732	40			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB-P2

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-sama yang bertujuan untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Apabila $F_{hitung} >$

F_{tabel} dan nilai signifikansi $F < 0,05$ maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019). Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan F_{hitung} sebesar 609,436 dengan signifikansi 0,000. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $609,436 > 3,245$ dan taraf signifikansi $0,000 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan dan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Uji t

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	54169,537		18,790	,000		
	PBB-P2	3,749E-6	,877	25,913	,000	,694	1,440
	BPHTB	4,681E-6	,175	5,167	,000	,694	1,440

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $t < 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $t > 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019). Berdasarkan tabel di atas variabel PBB-P2 nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $25,913 > 2,026$ dengan taraf signifikansi uji $t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Untuk variabel BPHTB mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,167 > 2,026$ dengan taraf signifikansi uji $t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa BPHTB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	
1	,985 ^a	,970		,968
a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB-P2				
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah				

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel indepen secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Jika mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika R^2 semakin kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup (Ghozali, 2019). Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,97 (97%), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 97%, sedangkan sisanya sebesar 3% ($1 - 0,97$) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

4. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing, hal ini dibuktikan dengan mendapatkan korelasi positif yang artinya jika penerimaan pajak PBB-P2 meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat. Namun sebaliknya jika penerimaan pajak PBB-P2 menurun maka penerimaan pajak daerah akan menurun juga. Secara parsial pajak BPHTB memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing, hal ini dibuktikan dengan mendapatkan hasil korelasi positif yang artinya jika penerimaan pajak BPHTB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat. Namun sebaliknya jika penerimaan pajak BPHTB menurun maka penerimaan pajak daerah akan menurun juga. Secara simultan pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing.

Referensi

- Basri. (2022). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Collection Systems and Procedures in Manado City*. 6(1), 247–258.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.).

- Kristina, M. (2019). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tebet. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Marihot, S. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Pratiwi, A. D. (2019). *Analysis Of The Effect Of Earth And Building Tax Realization & Customization Of The Extension Of Land And Building Rights On Regional Original Realization (Case Study of the Regional Revenue Management Agency in Bandung City in 2013-2018)*. 1–11.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*.
- Tetti, M. N. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UUPRD Cirasas Jakarta Timur. 1985*, 17–39.
- Yani, R., Dede, M., & Sfrizal. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(6).
- Yanuar, A. (2019). *Pengaruh PBB , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016. I(3)*, 946–955.
- Tapokabkab, B. S., & Rosyati, T. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Leverage, Dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankanyang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021). *Bernadus Sutomo Tapokabkab& Tati Rosyati Jurnal Akuntansi Bareleng*.